

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari gambaran yang disampaikan pada bagian sebelumnya ada beberapa kesimpulan utama yaitu:

- a. Kebijakan diskriminatif dari sisi muatannya mengandung unsur-unsur diskriminasi dikarenakan beberapa hal: *pertama*, kebijakan tersebut bertentangan dengan tiga landasan kebijakan yang konstitusional, yaitu: Prinsip Non Diskriminasi, Kesetaraan Substantif dan Tanggung Jawab Negara. *Kedua*, bertentangan dengan kriteria Prinsip, kriteria Yuridis dan kriteria Substantif yang di dalamnya berpotensi melanggar 40 hak konstitusional warga negara Indonesia. *Ketiga*, tidak memuat pengakuan atas hak, kesempatan dan manfaat yang sama bagi semua warga tanpa memandang ras, agama, suku dan jenis kelamin.
- b. Kebijakan diskriminatif menyebabkan banyak perempuan kehilangan akses atas pendidikan, pekerjaan dan hak layanan dasar lainnya serta menyebabkan kekerasan dan stigma. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami menyebabkan anak perempuan terpaksa berhenti sekolah atau pindah ke sekolah yang bisa menerima keragaman pilihan agama. Kebijakan diskriminatif juga mengancam keberlangsungan perempuan untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga ketika perempuan tidak mendapatkan penghasilan maka akan berpengaruh terhadap pendidikan perempuan menjadi rendah. Kebijakan diskriminatif juga rendah. Namun dampak kebijakan diskriminatif akan berbeda pengaruhnya terhadap perempuan dengan

beragam latar belakang status sosial ekonomi, pendidikan, agama dan daerah tempat tinggalnya. Bagi perempuan dari kelompok miskin dan minoritas agama akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan terhadap perempuan dengan latar belakang ekonomi mampu.

- c. Kebijakan diskriminatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perempuan untuk mencapai pendidikan dasar dan menengah, karena menyebabkan anak perempuan mengalami perundungan dan tekanan psikologis sehingga membuat mereka terpaksa mengundurkan diri atau keluar dari sekolah akibat tekanan sosial yang dialaminya.
- d. Variabel ekonomi memengaruhi signifikan terhadap tingkat pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Hal ini dikarenakan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya tingkat inflasi serta kemiskinan memiliki hubungan yang searah untuk memengaruhi pendidikan perempuan. Sumbangan pendapatan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencapai pendidikan perempuan pada tingkat menengah, karena sebagian besar pendapatan dan pengeluaran perempuan dialokasikan untuk memenuhi biaya pendidikan anak. Namun temuan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakan diskriminatif juga menyebabkan perempuan kehilangan pekerjaannya, dengan kata lain hal ini akan berdampak terhadap rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dan bertambahnya jumlah kemiskinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pendidikan perempuan.

- e. Pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pendidikan tinggi. Karena alokasi pembiayaan pendidikan gratis hanya pada tingkat pendidikan SD-SMA. Hal ini karena didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah; otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, 20 % APBN dan APBD dialokasikan untuk pembelanjaan di sektor pendidikan, kebijakan tentang pelaksanaan anggaran responsif gender di tujuh instansi pemerintah, termasuk Kemendiknas dan Permendiknas untuk mempertegas komitmen kementerian dalam membangun pendidikan yang berlandaskan keseimbangan gender. Beberapa kebijakan ini yang diduga menunjang dan berpengaruh positif pada pembelanjaan alokasi anggaran di sektor pendidikan yang dampaknya meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan pada sekolah dasar dan menengah.
- f. Pendidikan tinggi tidak terpengaruh oleh kebijakan diskriminatif maupun variabel ekonomi. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang membaik tidak serta merta membuat perempuan bisa mencapai tingkat pendidikan tinggi, selain itu kebijakan diskriminatif tidak memiliki dampak secara langsung terhadap mahasiswi. Diduga ada faktor lain yang memengaruhi pendidikan perempuan untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi, yaitu; masih kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan bias gender sehingga menempatkan pendidikan lebih diprioritaskan untuk pendidikan laki-laki, latar belakang pendidikan orang tua, motivasi, kondisi geografis, kebijakan yang responsif gender, sistem pembelajaran, pernikahan anak dan yang lainnya. Walaupun

dari temuan kualitatif mengkonfirmasi bahwa kebijakan diskriminatif juga mengenai pembatasan aktivitas di malam hari atau kebijakan yang dikategorikan dengan kriminalisasi terhadap perempuan juga memiliki dampak terhadap partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi.

- g. Keterwakilan perempuan di parlemen tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan dasar, dikarenakan beberapa hal masih minimnya jumlah legislatif perempuan yang menempati posisi strategis, jumlah keterwakilan perempuan masih minim serta kualitas legislatif perempuan yang masih belum memahami tentang isu gender.
- h. Faktor yang paling memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan menengah adalah kebijakan diskriminatif sedangkan pada tingkat pendidikan dasar pendapatan kabupaten/kota menjadi faktor yang paling memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat dasar.

Maka berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor makro dan mikro selain faktor ekonomi dan kebijakan diskriminatif yang memengaruhi secara langsung partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi.
- b. Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memulihkan perempuan yang menjadi korban atau terkena dampak diskriminasi dan kekerasan dari pelaksanaan kebijakan diskriminatif, dengan

mempertimbangkan dampaknya berbeda terhadap perempuan dengan beragam latar belakang.

- c. Melakukan berbagai kajian untuk melihat dampak kebijakan diskriminatif terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender serta pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai acuan dalam memperbaiki kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- d. Salah satu variabel ekonomi yang memengaruhi signifikan terhadap tingkat pendidikan perempuan adalah sumbangan pendapatan dan pengeluaran per kapita perempuan, maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya program dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perempuan.
- e. Legislatif di kabupaten/kota bersama dengan pemerintah dan masyarakat perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari kebijakan diskriminatif sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan.
- f. Mendorong pemerintah dan legislatif kabupaten/kota untuk mengadopsi panduan kebijakan konstitusional dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan yang akan disusun atau sudah dilaksanakan untuk melihat unsur-unsur diskriminasi dan dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional.
- g. Pemerintah dan legislatif kabupaten/kota perlu menyediakan dana pendamping untuk program-program yang menghilangkan disparitas gender di sektor pendidikan, seperti meningkat anggaran beasiswa untuk perguruan tinggi bagi perempuan.

h. Kondisi ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan perempuan, maka pemerintah perlu melakukan data terpilah dengan menggunakan analisis gender untuk melihat dampak yang berbeda terhadap pendidikan perempuan dan laki-laki, sehingga intervensi dalam mengatasinya berbasis pada situasi dan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar Rythia, Yarrow Noah, Surbakti Soedarti, Cooper Rachel. *Inclusion in Indonesia's Education Sector A Subnational Review of Gender Gaps and Children with Disabilities*.
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33943/Inclusion-in-Indonesias-Education-Sector-A-Subnational-Review-of-Gender-Gaps-and-Children-with-Disabilities.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses pada 10 Agustus 2021. Policy Research Working Paper World Bank Group;
- Ashari Hasan. 2014. *Anggaran Pendidikan 20%, Apakah sudah dialokasikan?*.
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-anggaran-pendidikan-20-apakah-sudah-dialokasikan-2019-11-05-ce5eea4c/> . diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
- Badan Pusat Statistik, 2010-2019, *Indeks Pemberdayaan Gender*, www.bps.go.id, diakses 12 Oktober 2018.
- Checchi Daniele. 2003. *Inequality in Incomes and Access to Education. A Cross-Country Analysis (1960-95)*
- Chunyah Tutut. 2015. *Problem dalam Perkembangan Psikologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. <http://fppsi.um.ac.id/?p=1278>
- Coley Richard J& Baker Bruce , 2013. *Poverty and Education: Finding the Way Forward*. ETS Center for Research on Human Capital and Education Research and Development Educational Testing Service. Rosedale Road USA.

- Desmita, 2009. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi kedua)*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriyanti Rahmi & Habibullah.2012. *Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang*. Sosiokonsepsia Vol 17 No 01 2012.
<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/bbd6c378095e1ce3e45398f3789b5bc6.pdf>
- Halimatusa'diyah Iim, *Semakin Banyak Perempuan di DPR, tapi Riset Ungkap Kehadiran Mereka Mungkin tidak Signifikan*.
<https://theconversation.com/semakin-banyak-perempuan-di-dpr-tapi-riiset-ungkap-kehadiran-mereka-mungkin-tidak-signifikan-125013>
- Hasani Ismail.2020. *Pengujian Konstitusional Perda: Respon Atas Perda Intoleran-Diskriminatif dan Pemodelan Baru Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
- Hasani Ismail, Yosarie Ikhsan & Aini Noryamin. 2019. *Dampak Produk Hukum Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: Setara Institut
- Human Right Watch (HRW). 2021. *“Aku Ingin Lari Jauh” Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia*. Amerika Serikat: HRW

Karisma Bayu. 2017. *Assesing The Impact Of Cash Transfer on Social Capital In*

Indonesia, www.researchgate.net/publication/315797463

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Kesetaraan*

Gender dan Pendidikan.

[https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d927c-9aeb5-3.-kesetaraan-](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d927c-9aeb5-3.-kesetaraan-gender-dan-pendidikan.pdf)

[gender-dan-pendidikan.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d927c-9aeb5-3.-kesetaraan-gender-dan-pendidikan.pdf) . Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2021

Khan, Mussarat Khadija. *Contribution of female human capital in economic*

growth: an empirical analysis of Pakistan (1972-2012). 2016, Quality and

Quantity; Dordrecht Vol. 50, Iss. 2, (Mar 2016): 709-728.

Komnas Perempuan.2017.*Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016*

Labirin Kekerasan Terhadap perempuan Dari gang rape hingga Femicide.

Jakarta: Komnas Perempuan.

International Labour Organisation (2004). *Jender dan Kemiskinan*. Jakarta:

Kantor Perburuhan Internasional.

Jolianis. *Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita*

Dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. 2015, Jurnal Economica, Vol.3

No.2 (168 - 183).

Novrian Satria, *Factors That Influence The Accessibility of Education For*

Children In Indonesia, 2015, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 21, No

3.

Nugraha Ryan. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.

- Pratikto, R., Ikhsan, M., & Mahi, B. R. (2015). *Unequal Impact of Price Changes in Indonesia*, 61(3), 180–195. <https://doi.org/10.7454/efi.v61i3.511>
- Pratikto, R., Dewi Elisabeth, & Mulyati, Sri. (2021). *Peran Modal Sosial dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Jawa Barat*, UNPAR-SAPA-Keuskuspan Bandung-WCC Pasundan Durebang.
- Pratikto, R., Dewi Elisabeth, & Mulyati, Sri. (2020). *Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pendidikan Perempuan di Jawa Barat*. Bandung: LPPM UNPAR
- Putri Suryani (2017). *Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian Jakarta*. <https://statistik.jakarta.go.id/analisis-pengaruh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-terhadap-perekonomian-dki-jakarta/>. Diunduh pada tanggal 26 Juli 2021.
- Savitri Niken. 2016. *Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan*. <https://unpar.ac.id/kesetaraan-gender-dalam-dunia-pendidikan/> . Griya Ilmu kompas: Jakarta: 12 April 2016
- Sehrawat Madhu. 2013. *Human capital and income inequality in India: is there a non-linear and asymmetric relationship?*. *Applied Economics* 51(50):1-12
- Setiawati Elis, Malihah Elly, Komariah Siti. 2017. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perempuan Berperan Sebagai Pengambil Keputusan di Dalam Keluarga di Kelurahan Isola. *Sosietas*, Vol. 7, NO. 1, 2017. Universitas Pendidikan Indonesia
- Simangunsong R, Imelda I, Mulyati S. 2017. *Akses dan Perlindungan Hak-hak Perempuan: Studi Kasus Dampak Sosial dan Ekonomi dari Implementasi*

Perda no 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya. Jaringan Advokasi Jawa Barat

Son, H. H. (2006). *Poverty Centre CHANGES ON POVERTY Working Paper. Development*, (33).

Subrahmanyam Gita. 2016. *Gender perspectives on causes and effects of school dropouts from primary and secondary education in developing countries – an overview*, London School of Economics, Swedia

Susenas Badan Pusat Statistik, 2011-2019, www.bps.go.id, 27 Maret 2021.

Tansel Aysit & Güngör Nil Demet.2012. *Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey*. IZA Discussion Paper No. 653201/04/2012 Department of Economics Middle East Technical University 06531, Ankara.

Veronica et.all. 2013. *Kesenjangan Gender Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Fisip vol 2 No 1. Universitas Tribhuwana Tungadewi

Yentriyani A et all. 2010. *Atas nama Otonomi Daerah*. Komnas Perempuan. Jakarta.

Yentriyani et all. 2016. *Laporan Pemantauan Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama*. Komnas Perempuan. Jakarta

United Cities and Local Government (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui oleh Pemerintah Daerah* Retrieved from <https://issuu.com/uclgcglu/docs/tujuan-sdgs>